



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021-2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 –2026 merupakan bagian integral dari Program Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo selama 5 (lima) Tahun.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatar belakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (unified budget) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan (sustainable program) berbasis kinerja.

Secara rinci RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 berisi kemajuan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada masing-masing bidang di lingkungannya. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Demikian penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, semoga bermanfaat.

Barabai, 18 September 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah



EDINA FITRIA RAHMAN, S.STP, MM
NIP. 19840711 200312 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Sistematika Penulisan	7
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika	12
B. Sumberdaya	17
C. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	36
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	42
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
C. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi	46
D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
E. Penentuan Isu-isu Strategis	51
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika	53

BAB. V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
	Startegi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.	55
BAB. VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika	59
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 - 2026.	67
BAB. VIII	PENUTUP	
	A. Pedoman Transisi.	68
	B. Kaidah Pelaksanaan	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sumber Daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika	17
Tabel 2 Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika.....	19
Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	37
Tabel 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika	38
Tabel 5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	42
Tabel 6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
Tabel 7 Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	47
Tabel 8 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pembangunan Komunikasi dan Informatika	49
Tabel 9 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Analisis KLHS(TPB).....	50
Tabel 10 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2021 – 2026	54
Tabel 11 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2021 – 2026	57
Tabel 12 Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026.....	62
Tabel 13 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2021 - 2026	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Logic Frame Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Lampiran 2 Pohon Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Lampiran 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Lampiran 4 Indikator Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Lampiran 5 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif

[Click here to enter text.](#)

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) Perangkat Daerah (PD) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Proses Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pembentukan tim penyusunan Renstra PD dan menyusun agenda kerja tim penyusunan Renstra. Tim penyusunan Renstra PD bertugas menyelenggarakan forum PD, merumuskan rancangan Renstra PD dan menyusun rancangan penetapan Renstra PD oleh Kepala PD dengan Keputusan kepala PD. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada di masing-masing Bidang dan diketuai oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di Bidang yang bersangkutan.

2. Tahap Perumusan / Penyusunan

Pengolahan data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3. Analisis gambaran pelayanan PD, terdiri

- a) Analisis gambaran umum pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan PD
- b) Analisis pengelolaan pendanaan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada pendanaan pelayanan PD

4. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi , mencakup :
 - a) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
 - b) Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
 - c) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD Kabupaten/Kota
 - d) Program prioritas PD Propinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup:
 - a) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang
 - b) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah
6. Perumusan Isu-isu Strategis
7. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPD
8. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah SKPD
9. Tahap Verifikasi
10. Tahap Penetapan

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan demikian renstra ini merupakan acuan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 5 tahun kedepan dalam upaya untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2016 dan Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024

B. Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembara Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tim Telematika Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan e-Government;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
20. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Persandian;
21. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik tahun 2020-2024
22. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2020-2024

23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini, dimaksudkan untuk menyediakan tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bagian penjabaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi dalam rangka menjalankan visi dan misi Kepala Daerah sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.

Tujuan Penyusunan renstra Perangkat Daerah ini adalah :

1. Menjadikan kerangka dasar dalam upaya memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika dalam turut mendukung pencapaian sasaran Renstra Kementerian, Renstra Propinsi dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Memberi pedoman untuk pembuatan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah;
3. Mempermudah pelaksanaan evaluasi, penyusunan serta penyampaian laporan kinerja yang terukur;

4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
5. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rentang tahun 2021-2026

D. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatia KabupatenHulu Sungai Tengah 2016-2020 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB.I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/Kabupaten, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah, uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme);

B. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

C. Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Tengah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs (Millenium

Development Goals) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan;

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika,

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Tengah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

C. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Selatan

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Selatan.

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

E. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditinjau dari

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah,
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian,
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan dalam metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut, dengan demikian pada

bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta Indikator Kinerjanya.

BAB. V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam lima tahun mendatang.

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif .

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB, VIII PENUTUP

- A. Pedoman Transisi
- B. Kaedah Pelaksanaan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika, pasal 4 ayat 1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) menyelenggarakan Fungsi:

- 1) pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 2) penyelenggaraan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 4) penyelenggaraan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

1) Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Dinas dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.

2) Fungsi

- a) Pengorganisasian penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b) Pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
- c) Pengoordinasian Penatausahaan urusan keuangan;
- d) Pengoordinasian Penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
- e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.
- f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

1) Tugas Pokok

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan dan perijinan komunikasi publik, media informasi publik, serta statistik.

2) Fungsi

- a) Pengoordinasian Penyusunan rencana kerja Bidang;
- b) Pengoordinasian Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang kemitraan dan perijinan komunikasi publik, media informasi publik, serta statistik;

- c) Pengoordinasian Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan perijinan komunikasi publik, media informasi publik, serta statistik;
 - d) Pengoordinasian Pengelolaan kemitraan dan perijinan komunikasi publik;
 - e) Pengoordinasian Pengelolaan media informasi publik;
 - f) Pengoordinasian Pelayanan informasi publik;
 - g) Pengoordinasian Pengelolaan statistic sektoral;
 - h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
 - i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informatika dan Persandian
- 1) Tugas Pokok
Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan aplikasi informatika, pengembangan E-Government, serta keamanan informasi, dan persandian.
 - 2) Fungsi
 - a) Pengoordinasian Penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b) Pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan aplikasi informatika, pengembangan E-Government, serta keamanan informasi, dan persandian;
 - c) Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan aplikasi informatika, pengembangan E-Government, serta keamanan informasi, dan persandian;
 - d) Pengoordinasian pengembangan sarana dan aplikasi informatika;
 - e) Pengoordinasian pengembangan E-Government;

- f) Pengoordinasian pengembangan keamanan informasi dan persandian;
- g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur dan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari yakni sebagai berikut :

a. Kepala PD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II.b, Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan eselon III.A, membawahi 2 (dua) sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang oleh seorang Kepala Sub Bagian (eselon IV,a) sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang-bidang

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 2 (dua) bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan eselon III.B dan membawahi beberapa seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan eselon IV.A yaitu :

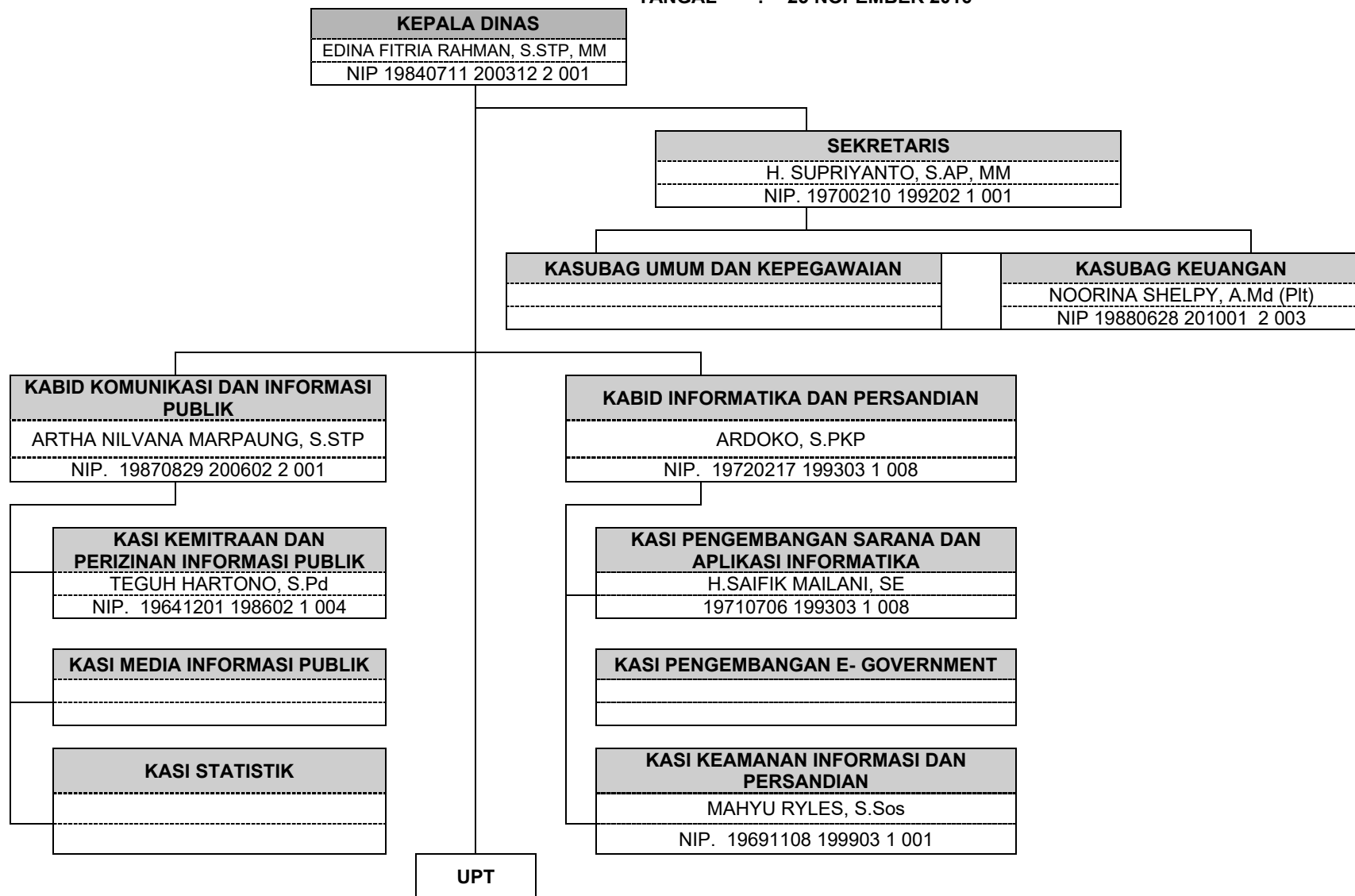
- 1) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahkan 3 (tiga) seksi
 - a) Seksi kemitraan dan Perijinan Komunikasi Publik
 - b) Seksi Media Informasi Publik
 - c) Seksi Statistik
- 2) Bidang Informatika dan Persendian, membawahkan 3 (tiga) seksi
 - a) Seksi Pengembangan Sarana dan Aplikasi Informatika

- b) Seksi Pengembangan E Government
- c) Seksi Keamanan Informasi, dan Persendian
- d. Unit Pelayanan Teknis
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

**NOMOR : 45 TAHUN 2016
TANGAL : 25 NOPEMBER 2016**



B. Sumberdaya

Tabel 1
SUMBERDAYA MANUSIA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. HULU SUNGAI TENGAH

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		S.3	S.2	S.1 / D.IV	SM / D.III	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Bagian Sekretariat	-	1	1	3	1	-	-	6
3	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	-	-	3	-	-	-	-	3
4	Bidang Informatika dan Persandian	-	-	4	1	-	-	-	5
7	Jabatan Fungsional (Jafung)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	C P N S	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tenaga Kontrak	-	-	4	1	3	-	-	8
	JUMLAH	-	2	12	5	4	-	-	23

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin :

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	17	73,91
2.	Perempuan	6	26,08
	JUMLAH	23	

3. Komposisi Berdasarkan yang Mengikuti Pelatihan Penjenjangan :

NO	Jenis Penjenjangan	Jumlah	%
1	DIKLAT PIM II	0	0
2	DIKLAT PIM III	0	0
3	DIKLAT PIM IV	2	28,57
	JUMLAH	7	

4. Komposisi Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan :

NO	Pangkat / Golongan	Jumlah	%
3	Golongan IV/b	1	6,6
2	Golongan IV/a	2	13,3
4	Golongan III/d	4	31,25
5	Golongan III/c	-	-
6	Golongan III/b	-	-
7	Golongan III/a	4	26,6

8	Golongan II/d	1	6,6
9	Golongan II/c	3	20
10	Golongan II/b	-	-
11	Golongan II/a	-	-
JUMLAH		15	

5. Komposisi SDM Berdasarkan Kualifikasi Keahlian :

NO	Jenis pendidikan/keahlian	Jumlah SDM yang diperlukan	SDM yang ada
1	Operator Jaringan Microtik	2	1
2	Operator Website	1	1
3	Operator Videotron	1	1
4	Operator/Pengelola Server	1	1
5	Teknisi Radio Siaran	1	-
6	Teknisi Radio Repeter/UHF	-	-
7	Penyusun Program Siaran	1	-
8	Penerjemah Bahasa	-	-
9	Pranata Komputer	4	2
10	Programer	3	1
11	Statistik	2	1
JUMLAH		21	8

Tabel. 2
SARANA dan PRASARANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
1	Mobil Jeep	1	Suzuki/SJ140 Katana	2006	Pembelian	107.000,000,-	
2	Mobil Mini Bus	1	Toyota / New Kijang Innova	2014	Pembelian	295.385,000,-	
3	Sepeda Motor	1	Suzuki	2008	Pembelian	15.500,000,-	
4	Sepeda Motor	1	Suzuki Thunder	2011	Pembelian	16.977,500,-	
5	Solder Listrik	1	Dekkon / Presto 938N	2018	Pembelian	230.000,-	
6	Mesin Bor Kayu	1	Mactec /MT 80R	2018	Pembelian	1.040.000,-	
7	ILS.Calibration RX.	1	GARMIN / GPSMAP.64s	2019	pembelian	4.834.800,-	
8	Scanner (Universal Tester)	1	BROTHER / ADS-1200	2019	Pembelian	5.063.000,-	
9	Lemari Besi/Metal	2	FRONTLINE	2019	Pembelian	7.112.800,-	
10	Rak Besi	1	Indorack / IR9020G	2014	Pembelian	9.039.948,-	Rak Server
11	Rak Besi	1	-	2019	Pembelian	2.058.400,-	Rak Koran
12	Filing Cabinet Besi	1	Secure Line	2011	Pembelian	10.656.867,-	
13	Filing Cabinet Besi	1	Brother / besi/metal	2018	Pembelian	3.492.500,-	
14	Filing Cabinet Besi	4	FRONTLINE	2019	Pembelian	14.445.600,-	Filling Cabinet
15	Alat Penghancur Kertas	4	HSM / HSM Classic 80.2	2019	Pembelian	10.938.600,-	
16	Mesin Absensi	1	Solutio / X601	2017	Pembelian	4.489.100,-	
17	LCD Projector/Infocus	2	Epson / EB-X450	2020	Pembelian	15.290.000,-	

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
18	Papan Nama Instansi	2	buatan lokal	2018	Pembelian	1.540.000,-	
19	Papan Tulis	1	Mitsubishi	2019	Pembelian	1.033.300,-	PAPAN TULIS BERODA
20	Meja Kerja Kayu	2	Lokal / 1/2 biro	2005	Pembelian	1.400.000,-	
21	Meja Kerja Kayu	1	Lokal / Bentuk L	2013	Pembelian	1.500.000,-	Meja Dialog Bentuk L ALAT STUDIO di BAGIAN HUMAS
23	Meja Kayu /Rotan	2	Lokal	2005	pembelian	1.400.000,-	
24	Kursi Tamu	2		2019	Pembelian	3.099.400,-	KURSI TUNGGU RUANG STAF
25	Kursi Rapat	20	Chitose	2004	Pembelian	3.220.000,-	
26	Kursi Putar	5	Tiger	2011	Pembelian	1.994.480,-	
27	Kursi Putar	7	FRONTLINE / KURSI PUTAR	2019	Pembelian	6.477.100,-	KURSI PUTAR UNTUK STAF
28	Sofa	1	GUARDIAN / MODERN SOFA	2019	Pembelian	6.184.000,-	SOFA KANTOR + MEJA TAMU
29	Lemari Es	1	sanken / SK/V/171a-CB	2019	pembelian	3.850.200,-	
30	A.C. Window	4	LG / Inverter	2018	Pembelian	22.000.000,-	
31	A.C. Window	2		2019	Pembelian	11.945.000,-	

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
32	A.C. Split	1	Polytron / PAC12VE	2017	Pembelian	5.555.000,-	
33	A.C. Split	2	Panasonic / CUYN9SKJ	2017	Pembelian	9.897.800,-	
34	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	LOKAL / LOKAL	2018	Pembelian	1.000.000,-	MEJA MEMASAK
35	Radio	2	Polytron	2013	pembelian	1.000.000,-	
36	Radio	1	Auland / Auland Radio Tuner	2017	Pembelian	2.838.000,-	
37	Televisi	1	Sharp / LCD	2018	Pembelian	6.490.000,-	
38	Televisi	1	Samsung / LCD	2019	Pembelian	7.467.800,-	Televisi LCD
39	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4	SONY	2013	Pembelian	2.000.000,-	Tape
40	Sound System	1	BMB	2011	Pembelian	7.114.433,-	
41	Microphone	1	-	2020	pembelian	2.997.500,-	
42	Microphone	1	-	2020	Pembelian	2.100.000,-	Mic wireless Conference-Podium UHF-898
43	Unit Power Supply	1	ICA / SE 1102C11	2019	Pembelian	3.410.200,-	UPS SERVER SE Series online Sinewave UPS
45	Camera Video	1	SONY / CYBERSHOT DSC-HX350	2019	Pembelian	5.063.000,-	CAMERA DIGITAL
46	Camera Video	1	SONY / HXR-MC2500	2019	Pembelian	10.126.000,-	HandyCam
47	Alat Pemadam/Portable	1	Celcius	2019	Pembelian	1.081.200,-	
48	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Focus	2018	pembelian	2.420.000,-	

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
49	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	ACTIV GALANT / MD 180	2018	Pembelian	3.750.000,-	
50	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	ACTIV GALANT / MTO 163	2018	Pembelian	8.250.000,-	
51	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2	ACTIV / MT120 MELODY	2018	Pembelian	1.000.000,-	
52	Meja Operator	1	LOKAL	2015	Pembelian	3.100.000,-	MEJA SIARAN
53	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	ACTIV GALANT / MKO 121	2018	Pembelian	5.850.000,-	
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	ACTIV KENT / KD 104	2018	pembelian	2.850.000,-	
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	ACTIV KENT / KM 104	2018	Pembelian	7.050.000,-	
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	Frontline New SC HAD 0212	2014	Pembelian	4.697.000,-	
57	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4	PHONEX / PHONEX	2018	Pembelian	1.540.000,-	Kursi Staff
58	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	ACTIV / OC-079H	2018	Pembelian	2.700.000,-	Kursi Studio Radio
59	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2	Phoenix / Phoenix	2018	Pembelian	770.00,-	kursi kerja
60	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	12	PHONEX / PHONEX	2018	pembelian	4.620.000,-	
61	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	Brother	2006	Pembelian	3.525.500,-	
62	Audio Mixing Console	1		2020	Pembelian	3.850.000,-	Mixer Audio Zumark F4 USB 4 Channel
63	Modulation Monitor Speaker Kabaret	2	Stanton / DJ Pro2000	2017	Pembelian	4.796.000,-	
64	Microphone/Boom Stand	2	Holder Microphone / Condenser	2017	Pembelian	1.386.000,-	
65	Microphone Connector Box	2	Behringer / B1	2017	Pembelian	5.676.000,-	

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
66	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	APC / SUA 1000RMI	2014	pembelian	10.465.247.250,-	UPS
67	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Flazer	2011	Pembelian	1.560.916.000,-	
68	Digital Audio Taperecorder	2	Sony / ICD-PX470	2018	Pembelian	2.400.000,-	IP RECORDER
69	Cable	1		2020	Pembelian	5.714.500,-	Kabel HDMI
70	Cable	1		2020	Pembelian	1.000.000,-	erkabelan (Set Kabel Audio Kabel Listrik dll)
71	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	YAMAHA MGP16X / MIXER AUDIO	2016	Pembelian	10.928.500,-	MIXER AUDIO STUDIO
72	peralatan studio audio lainnya (dst)	2		2019	pembelian	7.150.500,-	Running Text
73	Video Monitor	1	Lokal / LED	2014	Pembelian	690.685.700,-	Videotron
74	Video Switcher	1	ATEM	2020	Pembelian	7.250.000,-	Blackmagic Design ATEM Mini HDMI Live Stream Switcher
75	Camera View Finder	1	Silicon / 24SE7EN	2017	Pembelian	6.534.000,-	
76	Camera View Finder	1	HIKVISION / 16 CHANNEL	2019	Pembelian	9.053.000,-	NVR CCTV di gdg Data center. IP CAMERA
77	Camera View Finder	1		2019	Pembelian	12.436.100,-	
78	Layar Film/Projector	1	VIEWSONIC / DLP PROJECTOR	2019	pembelian	5.063.000,-	
79	Head Set	1	Logitech / G331	2020	Pembelian		Stereo Gaming Headset
80	Lampu Blitz Kamera	1		2020	Pembelian		Kamera Lighting

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
81	Video Splitter	1	PX-HD2	2020	Pembelian	3.300.000,-	Splitter HDMI 1 input 8 Output
82	Camera Conference	1		2020	Pembelian	3.900.000,-	RCC aibency 1080p HD Conference Camera
83	Alat Studio Video Lainnya	1	Rexus	2020	Pembelian	4.500.000,-	Video Capture Rexus HD100 4k Record And Streaming
84	Kamera Udara	1		2020	pembelian	19.068.500,-	Drone dan Kelenekanannya
85	Telephone (PABX)	2	Panasonic	2017	Pembelian	605.000,-	
86	Handy Talky (HT)	1	Quansheng	2013	Pembelian	5.484,600,-	
87	Handy Talky (HT)	1	Quansheng / TG-UV2	2014	Pembelian	15.600,000,-	
88	Handy Talky (HT)	1	Quansheng / TG-UV2	2014	Pembelian	11.700,000,-	
89	Handy Talky (HT)	4	Kenwood	2019	Pembelian	14.697.500,-	
90	Peralatan Jaringan Lainnya	3	RB / RB911G-5HPnD-QRT	2014	Pembelian	17.400,000,-	-
91	Radio CPE Airgrid	1	-	2014	Pembelian	2.750,000,-	-
92	Radio CPE Nano Bridge	1	-	2014	Pembelian	1.800,000,-	-
93	Raouter Indoor	3	-	2014	Pembelian	3.300,000,-	-

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
94	Pangkon Antena	4	-	2014	Pembelian	1.750,000,-	-
95	Cable STP Cat 5 or Cat 6	1	Belden / STP	2014	Pembelian	1.980,000,-	-
96	Conector RJ 45	1	Tought / RJ 45	2014	Pembelian	620,000,-	-
97	Rack Mount	1	Lokal / 1 Pintu/19 inc	2014	Pembelian	4.500,000,-	-
98	RB 951 U	1	RB / 951Ui-2HND	2014	Pembelian	950,000,-	-
99	Radio Sektor High Power Back Bone	1	-	2014	Pembelian	17.572,500,-	-
100	Radio CPE Air Grid 23 BDEE SKPD	6	-	2014	Pembelian	13.007,500,-	-
101	POE 24v 0,5 Ampere	4	-	2015	Pembelian	1.100,000,-	-
102	Adaptor Mikrotik 24 volt 1 Ampere	3	-	2015	Pembelian	825,000,-	-
103	TL WA 5210 G	2	-	2015	Pembelian	1.705,000,-	-
104	Pangkon Antena	7	-	2015	Pembelian	2.695,000,-	-
105	Acces Point	2	D Link / IIAT	2014	Pembelian	950,000,-	-
106	Software	1	Win Server3	2014	Pembelian	15.819,910,-	Ms. Server License

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
107	Switch Backer	1	Switch HP/ Procurve	2014	Pembelian	10.004,210,-	Switch Hub
108	Stand Mic	1		2015	Pembelian	715,000,-	
109	Switches/Antena Menara Lainnya	1		2015	Pembelian	21.325,000,-	Pemasangan Grounding Tower
110	Wireless Amplifier	1	Lokal	2013	Pembelian	288.984,000,-	
111	Audio Processor	1		2015	Pembelian	935,000,-	
112	Alat Komunikasi Radio SSB Lainnya	1	Lokal / Besi	2014	Pembelian	30.500,000,-	Tower Jaringan
113	Unit Pemancar Fm/Mw Port	1	Lokal	2013	Pembelian	288.984,000,-	Pemancar Radio
114	Switch Backer	1	Switch HP / Procurve	2014	Pembelian	10.004,210,-	
115	Meja Kerja	10 Buah	Active Vino MT 120 Beac	2014	Pembelian	5.808,000,-	
116	Bangunan Menara	1			Pembelian	796.125,700,-	
117	Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya	1			Pembelian	5.450,000,-	Instalasi PDAM
118	Telex	1		2015	Pembelian	715.000,-	
119	Facsimile	1	Panasonic	2017	Pembelian	2.238.500,-	

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
120	Mesin Genset	1	Maxtron / MV - 28 TD	2013	Pembelian	74.360,000,-	
121	P.C. Unit	1	Core i7, NVidia 4 GB, Ram 16 GB	2016	Pembelian	24.860,000,-	PC Unit, Rakitan Casing Infinity, Core i7, NVidia 4 GB, Ram 16 GB
122	P.C. Unit	1	HP / Pavilion All in One 20 - A210L	2014	Pembelian	7.400,000,-	
123	P.C. Unit	2	LG	2013	Pembelian	17.952,000,-	
124	P.C. Unit	1	LG	2013	Pembelian	5.882,880,-	
125	P.C. Unit	1	HP	2014	Pembelian	17.930,000,-	Pengadaan Komputer PC (Multimedia)
126	P.C. Unit	3	ecs	2014	Pembelian	18.513,000,-	
127	P.C Unit	4	LENOVO / PC DEKSTOP IC510-151CB	2019	Pembelian	39.483.200,-	PC DEKSTOP IC510-151CB (i5-9400,4GB DDR4, 2TB,21,5", Win 10 HSL
128	P.C Unit	2	ACER / Savio	2018	Pembelian	11.440.000,-	
129	P.C Unit	1	HP / HP 22-C0035D (3JV78AA)	2019	Pembelian	10.126.000,-	ALL IN ONE

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
130	P.C Unit	2	LENOVO / PC ALL IN ONE A340-22IWL AIO	2019	Pembelian	17.541.280,-	PC ALL IN ONE A340 - 22IWL AIO (i3-8145U,4GB DDR4, 1TVB, 21,5", Win 10 Home)
131	Note Book	1	Tosiba / Satellite P745	2012	Pembelian	11.119,850,-	
132	Note Book	1	DELL / INSPIRON 5459	2015	Pembelian	14.850,000,-	
133	Note Book	2	LENOVO / / 14" Core i3, 500 GB	2016	Pembelian	14.960,000,-	
134	Hardisk	1	-	2015	Pembelian	1.925,000,-	
135	Hardisk	2	TOSHIBA/CANVIO - EKSTERNAL HARDISK	2016	Pembelian	3.960,000,-	
136	Printer	1	Canon / Pixma MX397	2013	Pembelian	1.848,910,-	Pengadaan Printer Multifungsi
137	Printer	2	Canon / pixma MX 397	2014	Pembelian	1.452,000,-	
138	Printer	3	Canon / Pixma IP 2770	2014	Pembelian	2.359,500,-	
139	Printer	2	Canon / MX 397	2014	Pembelian	2.900,000,-	
140	Printer	1	Canon / E610	2015	Pembelian	2.420,000,-	Printer Multi Fungsi

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
141	Printer	2	EPSON / L120	2016	Pembelian	4.950.000,-	
142	Printer	3	EPSON / ECOTANK L3150	2019	Pembelian	10.638.600,-	
143	Printer	1	CANON / IP2770	2018	Pembelian	1.056.000,-	
144	Printer	1	CANON / IP2770	2018	Pembelian	1.000.000,-	
145	Printer	1	CANON / MX497	2018	Pembelian	3.400.000,-	PRINTER PSC
146	Printer	3	CANON / PIXMA iP2770	2019	Pembelian	3.637.350,-	PRINTER PIXMA iP2770
147	Hard Disk	2	DELL / Hard disk Server	2019	Pembelian	11.234.000,-	1,2TB 10K RPM SAS 12Gbps
148	Lap Top	3	ACER / E5-476G-599H	2018	Pembelian	28.200.000,-	
149	Lap Top	4	DELL / Inspiron 14 3000, core i5,	2019	Pembelian	36.466.200,-	
150	Lap Top	1	Asus / ROG STRIX SCAR	2020	Pembelian	37.125.000,-	
151	Server	1	HP Proliant / DL 360pG8	2014	Pembelian	75.332,910,-	
152	Server	1	DELL-PowerEdge / Power Edge - R730	2018	Pembelian	64.850.560,-	
153	Router	19	RB / 951Ui-2HND	2014	Pembelian	48.906,000,-	Router Indor SKPD

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
154	Router	1	CCR / 1009-8G-1S	2014	Pembelian	15.300,000,-	Router Utama
155	Router	1	RB / 951G-2HND	2014	Pembelian	8.500,000,-	Backup Router Utama
156	Router	7	-	2015	Pembelian	12.870,000,-	Router Indoor SKPD
157	Router	4	MIKROTIK / RB 951Ui - 2HnD	2018	Pembelian	4.423.600,-	
158	Hub.	1	lokal / 16 10/100 Mbps	2014	Pembelian	700,000,-	Swich HUB
159	Hub	4	Dlink / DGS-1008A	2018	Pembelian	1.551.200,-	
160	Radio Sektor Hight Power Back Bone	9	UNNT / Nsm 5 HP	2014	Pembelian	39.105,000,-	Peralatan Jaringan
161	Radio CPE Air Grid 23 DBI SKPD	16	Specs Atheros / M5HP23dBI	2014	Pembelian	38.335,000,-	Peralatan Jaringan
162	Pangkon Antena	26	Lokal / Besi	2014	Pembelian	10.010,000,-	Peralatan Jaringan
163	Kabel STP Cat 5	3	STP / Cat 5	2014	Pembelian	14.685,000,-	Peralatan Jaringan
164	Box Panel Back Bone	3	Lokal / Alumunium Coating	2014	Pembelian	675,000,-	Peralatan Jaringan
165	Swich 8 Port fast Ethernet Back Bone	3	Edimax / ES-3308P	2014	Pembelian	784,000,-	Peralatan Jaringan
166	Kabel STP Cat 5	3	STP / Cat 5	2014	Pembelian	13.350,000,-	Peralatan Jaringan

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
167	Konektor Cat 6	2	Cat 6 / Solid PE	2014	Pembelian	2.100,000,-	Peralatan Jaringan
168	Peralatan Jaringan Lainnya	3	RB / RB911G-5HPnD-QRT	2014	Pembelian	17.400,000,-	-
169	Radio CPE Airgrid	1	-	2014	Pembelian	2.750,000,-	-
170	Radio CPE Nano Bridge	1	-	2014	Pembelian	1.800,000,-	-
171	Raouter Indoor	3	-	2014	Pembelian	3.300,000,-	-
172	Pangkon Antena	4	-	2014	Pembelian	1.750,000,-	-
173	Cable STP Cat 5 or Cat 6	1	Belden / STP	2014	Pembelian	1.980,000,-	-
174	Conector RJ 45	1	Tought / RJ 45	2014	Pembelian	620,000,-	-
175	Rack Mount	1	Lokal / 1 Pintu/19 inc	2014	Pembelian	4.500,000,-	-
176	RB 951 U	1	RB / 951Ui-2HND	2014	Pembelian	950,000,-	-
177	Radio	2	Plytron	2013	Pembelian	1.000.000,-	
178	Cassete Recorder	4	SONY	2013	Pembelian	2.000.000,-	
179	Sound System	1	BMB	2011	Pembelian	7.114.430,-	

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
180	Camera Film	1	Canon	2012	Pembelian	7.916,090,-	
181	Handy Cam	1	SONY DCR-PJ10	2013	Pembelian	4.741,970,-	
182	Unit Pemancar MF/MW Transportable	1	RVR / RVR30W	2017	Pembelian	41.690.000,-	
183	Unit Pemancar VHF/FM Portable	1	RVR / TEX2000LIG HT	2019	Pembelian	126.620.000,-	PEMANCAR RADIO FM/TRANSMITTER
184	Tripod	1		2020	Pembelian	1.996.500,-	
185	Stabilizer	1		2020	Pembelian	7.491.000,-	Stabilizer Kamera
186	Transmitter	2		2020	Pembelian	11.600.000,-	Wireless Video Sender Hollyland Mars 300 Pro
187	Kontrol Elektronik	1		2020	Pembelian	1.350.000,-	Controller Kamera (Rotator CCTV Beserta Controllernya)
188	Kamera Digital	1	Sony / HXR-MC2500	2020	Pembelian	14.575.000,-	
189	Kamera Digital	1	SONY / A6400	2020	Pembelian	19.981.500,-	1 set dengan lensa
190	Komputer Jaringan lainnya	3	DELL / Dual Rank Memory	2019	Pembelian	17.701.280,-	Memory Ser+A4 : A14ver 16 GB RDIMM 2400MT/s
191	peralatan mainframe lainnya (dst)	1	ICA - UPS / SE1102C11	2018	Pembelian	34.004.300,-	
192	peralatan mainframe lainnya (dst)	1	BENQ GL20170, LOGITECH - MK200 / GL2017 , MK200	2018	Pembelian	1.494.600,-	

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
193	peralatan mainframe lainnya (dst)	1	MIKROTIK / Routerboard - CCR1036-12G-4S	2018	Pembelian	17.278.100,-	
194	Netware Interface External	1	TP - LINK / TL-R470T+	2018	Pembelian	700.800,-	Load Balance
195	Netware Interface External	2	Ubiquiti Rocket Kit / Ubiquiti 5 Ghz 30 DBI Rocket Didh W	2018	Pembelian	6.434.000,-	Pemancar Jaringan Data Komputer untuk Komunikasi Data
196	Netware Interface External	4	UBIQUITI / Airmax 5Ghz powerbeam 400MM	2018	Pembelian	6.616.000,-	
197	Netware Interface External	2	Ubiquiti / Rocket M5	2018	Pembelian	2.537.916,-	
198	Netware Interface External	2	UBIQUITI / ROCKET M5 5GHZ,up 150 Mbps	2018	Pembelian	2.712.000,-	
199	Netware Interface External	1	Modena (Tool Kit) / Modena 100 pcs	2018	Pembelian	1.080.000,-	
200	Netware Interface External	1	BNC (Lan Tester) / NF 3468	2018	Pembelian	450.000,-	
201	Netware Interface External	1	Heles (Avometer) / YX393	2018	Pembelian	420.000,-	

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
202	Netware Interface External	1	Antel (solder Absorption) / DS. 4	2018	Pembelian	140.000,-	
203	Netware Interface External	1	Talon (Crimping Tool) / TL-2810R	2018	Pembelian	540.000,-	
204	Netware Interface External	10		2018	Pembelian	98.940.000,-	Pemasangan grounding di 10 titik di kecamatan
205	Netware Interface External	1		2019	Pembelian	48.837.380,-	ROUTER WIRELES (RB9151G-2HnD),ACCESS POINT NANOSTATION M2 (NSM2),SWITCH HUB 8 (DGS-108),KABEL UTP STP CAT 5E,KONEKTOR RJ45, ACCESS POINT UNIFI AP AC LONG RANGE (UAP-AC-LR)
206	Mobile Modem GSM/ CDMA	1		2020	Pembelian	1.200.000,-	
207	Peralatan Jaringan lainnya	2	UBIQUITI / Airmax 5 Ghz Nano Mimo	2018	Pembelian	2.906.000,-	Pemancar Jaringan Komputer untuk Komunikasi Data

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
208	Peralatan Jaringan lainnya	8	UBIQUITI / Airmax 2.4 Ghz Nano Mimo	2018	Pembelian	10.924.000,-	Pemancar Jaringan Komputer untuk Komunikasi Data

C. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Ukuran Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari capaian target kinerja pada Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Pada Tabel 2.3.1 dapat dijelaskan bahwa :

- a. Capaian keseluruhan target indikator pada Renstra periode 2016-2021 secara keseluruhan masih perlu dioptimalkan. Penyebab utama dari kondisi tersebut terletak pada faktor Sumber Daya Manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
- b. Penentuan indikator tujuan dan sasaran juga perlu dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi riil dilapangan.
- c. Sinkronisasi tujuan dan sasaran pada semua jenjang juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik secara horizontal maupun vertikal

Pada Tabel 3 yang merupakan gambaran dari ketersediaan anggaran beserta ratio realisasinya, tergambar dengan hasil bervariasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada anggaran yang tertangani dengan baik, dilain pihak ada pula yang kurang. Faktor SDM menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius. Memang bukan suatu hal yang mudah dalam manajemen SDM ini, karena menyangkut banyak faktor. Hal yang tidak kalah penting dalam realisasi anggaran ini adalah monitoring yang harus dilakukan secara periodik dan terus menerus.

Tabel 3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah																			
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase media informasi publik			Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat	Tidak Baik	Tidak Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	83.3	86	87.5	77.8	84.2
					60	70	80	90	95	50	60	70	70	80					
2	Persentase Aplikasi yang dikembangkan			Indek Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5	2.8	3.4	3.9	4.5	0	0	0	2.5	2.84	0	0	0	64.1	63.1
3	Persentase Item data statistik daerah yang disajikan			Pesentase skpd yang menyampaikan kelengkapan data lengkap dan valid	45%	60%	70%	80%	90%	0%	50%	60%	70%	80%	0	83.3	85.7	87.5	88.9
4	Persentase Sarana dan Prasarana infrastruktur yang standard			Persentase SKPD menerapkan standarisasi pengamanan informasi dan persandian	0%	0%	0%	50%	65%	0%	0%	0%	40%	0%	0	0	0	80	0

Tabel 4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika																	
Kabupaten Hulu Sungai Tengah																	
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	246,205,750	498,950,668	586,440,900	568,887,350	-	180,779,916	252,245,806	479,694,161	521,540,815	-	73.4	50.6	81.8	91.7	39.07	46.14
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	-	54,750,000	35,130,061	165,370,000	44,055,000	-	50,349,689	35,015,000	96,720,497	41,657,561	-	92.0	99.7	58.5	94.6	87.18	29.61
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	-	11,373,000	17,650,000	19,350,000	5,954,000	-	10,269,200	13,048,800	18,366,500	977,950	-	90.3	73.9	94.9	16.4	(1.47)	(8.95)
Pengembangan dan pengolahan komunikasi publik	-	7,255,000	4,400,000	6,500,000	3,025,000	-	5,475,000	-	3,215,750	3,000,000	-	75.5	-	49.5	99.2	(15.03)	0.00

Pengembangan dan pengolahan informasi publik	-	355,420,000	685,640,000	410,890,000	70,370,000	-	316,556,733	448,066,650	349,087,835	67,061,562	-	89.1	65.4	85.0	95.3	(10.01)	(20.45)
Pengembangan dan Pengolahan E-Government	-	17,625,000	18,500,000	180,500,000	156,600,000	-	13,786,000	18,180,000	112,278,187	152,007,050	-	78.2	98.3	62.2	97.1	289.13	194.95
Pengembangan dan Pengolahan infrastruktur TIK	-	321,455,700	323,433,076	1,153,750,000	1,540,000,000	-	314,747,500	286,251,842	986,233,362	1,472,801,460	-	97.9	88.5	85.5	95.6	96.94	94.94
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan	-	-	-	-	36,550,000	-	-	-	-	32,548,000	-	-	-	-	89.1	0.00	0.00
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media	-	-	-	-	2,316,675,000	-	-	-	-	2,046,867,500	-	-	-	-	88.4	0.00	0.00
Program pengembangan data/informasi /statistik daerah	-	215,932,000	60,305,000	65,144,200	8,470,000	-	189,970,000	59,500,000	39,695,000	8,470,000	-	88.0	98.7	60.9	100.0	(50.35)	(60.21)

Pengembangan pengaman Informasi dan Persandian	-	-	7,500,000	-	-	-	7,350,000	-	-	-	-	98.0	-	(33.33)	(33.33)		
	-	1,230,016,450	1,644,008,805	2,587,945,100	4,750,586,350	-	1,081,934,038	1,112,308,098	2,085,291,292	4,346,931,898		88.0	67.7	80.6	91.5	58.21	66.25

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kesenjangan informasi di masyarakat
3. Pesatnya perkembangan TIK
4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
6. Keanekaragaman data statistik
7. Pengamanan Informasi

Peluang :

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, statistik, dan Persandian
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai Kabupaten yang secara astronomis berada pada 2°36.5'S 115°18'E. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah Hulu Sungai Kalimantan Selatan dengan orbitasi berada di 165 km dari kota Banjarmasin yang umumnya disebut kawasan *Banua Anam*. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, Sebelah Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sebelah utara dengan Kabupaten Balangan. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sangat strategis seyogyanya ditunjang dengan *ekosistem* komunikasi dan informatika yang memadai, dengan harapan gerak perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

Untuk lebih dalam mengetahui permasalahan yang akan di tindaklanjuti Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dilakukan suatu analisis terhadap situasi dan kondisi riil, yang disesuaikan dengan kewenangan tugas pokok serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijabarkan menjadi isu-isu strategis . Tabel-tabel dibawah ini merupakan gambaran kondisi tersebut.

Tabel 5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Hulu Sungai Tengah

NO	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor yang mempengaruhi pelayanan	
		Kewenangan internal SKPD	Diluar kewenangan Internal SKPD
1.	Kurangnya akses dan kualitas informasi publik	<ul style="list-style-type: none">- belum optimalnya pengelolaan berita, isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat- Belum optimalnya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik- Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik	<ul style="list-style-type: none">- Terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis komunikasi dan kehumasan- Terbatasnya ketersediaan anggaran

		<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kapasitas PPID - Belum optimalnya kerjasama media - Belum terkelolanya mitra strategis pemerintah - Kurangnya Sarana Pendukung Informasi 	
2.	Pengelolaan data statistik sektoral daerah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral - kurangnya Metadata Statistik Sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis statistik - Terbatasnya ketersediaan anggaran
3.	Masih rendahnya penerapan e gov perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Belum Optimalnya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Belum Optimalnya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah - Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah - Belum Optimalnya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis informatika - Terbatasnya ketersediaan anggaran
4.	Belum optimalnya Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis keamanan informasi dan persandian - Terbatasnya ketersediaan anggaran
5.	Manajemen perencanaan, keuangan, Kepegawaian, Barang Milik Daerah, dan kinerja perangkat daerah belum terkelola dengan maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah seringkali bersamaan waktunya dengan jadwal kegiatan yang lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis perencanaan, keuangan dan pengelolaan aset - Terbatasnya ketersediaan anggaran

		<ul style="list-style-type: none">- profesionalisme ASN belum tinggi- Belum optimalnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah- Belum optimalnya pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik daerah	
--	--	---	--

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan hasil proses politik yang dilaksanakan melalui Pilkada Kabupaten/Kota tahun 2020, ditetapkan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026, sebagai berikut

“Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)”

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mendukung pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat tiga elemen utama yaitu aspek makmur, aspek unggul, dan aspek dinamis. Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Makmur yaitu suatu keadaan dimana masyarakat HST dapat merasakan taraf hidup yang layak dan manusiawi yang dapat ditilik dari dimensi material maupun dirasakan melalui dimensi spiritual.
2. Unggul yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kemandirian kerja serta terciptanya infrastruktur daerah yang efektif dan mampu mendorong semangat yang kompetitif.
3. Dinamis merupakan wujud suasana kehidupan dimana masyarakat memanfaatkan nilai-nilai positif dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga norma agama dan budaya luhur sebagai jadi diri. Dinamis dalam konteks ini adalah merupakan konklusi dari terwujudnya kemakmuran suatu daerah dengan keunggulan sumber daya manusianya.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah harus didukung misi yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan , adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural.
2. *Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional.*
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia.
4. Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
5. Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan DanSosial.

Dari pernyataan misi kepala daerah tersebut, yang berkaitan dengan urusan bidang komunikasi dan informatika adalah misi ke 2 yaitu misi *Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional.*

Program Kerja Prioritas Kepala Daerah yang diimplementasikan dalam tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan faktor-faktor yang menjadi penghambat, pendorong terkait permasalahan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Tabel. 6

Visi : “Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)”				
No	Misi dan Program Prioritas KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I	Misi : Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional (misi II)			
1.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Belum optimalnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	- Terbatasnya sumberdaya manusia pemerintah daerah yang trampil dan	Adanya Kepedulian pemerintah daerah terhadap program prioritas untuk Mempercepat peningkatan

			Professional di bidang Komunikasi Publik - Kurangnya sarana prasarana pendukung informasi publik	kualitas pelayanan public
2.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Belum optimalnya penerapan e-Government	- Terbatasnya sumberdaya manusia pemerintah daerah yang trampil dan Professional di bidang TIK - Kurangnya sarana prasarana pendukung TIK	Adanya kepedulian pemerintah daerah meningkatkan pengembangan, pengelolaan aplikasi dan web untuk pelayanan publik dengan bermacam – macam jenis aplikasi.

C. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 (Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024) ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Fokus Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Tabel dibawah ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor

pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Selatan belum dapat disampaikan, karena sampai dengan renstra ini disusun, dalam waktu yang bersamaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam proses penyusunan.

Tabel 7

Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sasaran Jangka Menengah Renstra Diskominfo Prov Kalsel	Permasalahan yang mempengaruhi terhadap pelayanan SKPD	Faktor-Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;		Kurangnya pemanfaatan TIK sektor ekonomi dan Bisnis	Respon masyarakat dalam pemanfaatan TIK sektor ekonomi dan Bisnis belum merata	Adanya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sektor ekonomi dan bisnis melalui pemanfaatan TIK
2.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;		Pemanfaatan TIK masih berorientasi hiburan daripada pembelajaran	Pembelajaran menuju masyarakat cerdas digital minim secara kuantitas dan kualitas	Adanya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kecerdasan digitan
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik		Belum optimalnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	- Terbatasnya sumberdaya manusia pemerintah daerah yang trampil dan Professional di bidang Komunikasi Publik - Kurangnya sarana prasarana pendukung informasi publik	Adanya Kepedulian pemerintah daerah terhadap program prioritas untuk Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.		Belum optimalnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	Terbatasnya SDM perencanaan, keuangan, Kepegawaian, Barang Milik Daerah,	Kebutuhan akan SDM perencanaan, keuangan, Kepegawaian, Barang Milik Daerah sangat

					tinggi
--	--	--	--	--	--------

D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan pada kondisi wilayah dan daerah, dengan berlandaskan memiliki wilayah dan daerah yang sama maka dalam penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan melalui telaahan antara indikasi program dengan pemanfaatan ruang dalam jangka menengah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan urusan komunikasi dan informatika, tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 8
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Terhadap Pembangunan Komunikasi dan Informatika

No.	RTRW terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Pembangunan Jaringan Komunikasi	Layanan Komunikasi publik masih belum sesuai harapan	Merupakan kewenangan Kementrian/swasta	Tingginya ekspektasi masyarakat
2.	Penataan dan penyusunan pedoman system jaringan komunikasi	Belum adanya pedoman system jaringan komunikasi	Merupakan kewenangan Kementrian	Urgensi peningkatan layanan
3.	Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel	Layanan telepon kabel kurang diminati	Merupakan kewenangan Kementrian/swasta	-
4.	Pengembangan fasilitas hotspot pada fasilitas publik	Belum semua fasilitas publik tersedia asilitas hotspot	Terbatasnya Ketersediaan anggaran	Tingginya ekspektasi masyarakat
5.	Pengembangan menara bersama BTS	Masih adanya wilayah blankspot	Merupakan kewenangan Kementrian/swasta	Tingginya ekspektasi masyarakat
6.	Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Letak Menara (RTLTM)/Cell Planing	Belum adanya Kajian Teknis Rencana Tata Letak Menara (RTLTM)/Cell Planing	Keterbatasan SDM dan Ketersediaan anggaran	Urgensi ketersediaan pedoman teknis

2. Telaahan KLHS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dalam penyusunan KLHS RPJMD salah satu variabel yang menjadi bahan evaluasi adalah data-data capaian pembangunan sektoral berdasarkan indikator yang ditetapkan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. Ada 7 (tujuh) indikator TPB untuk urusan Komunikasi dan Informatika. Masih diperlukan penyamaan persepsi apakah dari tujuh indikator tersebut semuanya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Berdasarkan kemampuan, Kabupaten/Kota mungkin baru dapat mengampu 1 (Satu) indikator saja, yaitu : *“Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan*

perundang-undangan”, sedangkan untuk 6 (enam) indikator lainnya merupakan kewenangan Pusat atau Provinsi.

Hasil analisis terhadap permasalahan dari telaahan dokumen KLHS Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026 tidak di dapatkan rekomendasi pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, namun jika mengacu kepada capaian indikator TPB/SDGs dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Analisis KLHS(TPB)

No.	Hasil KLHS (TPB)Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Belum tersedia data	Merupakan kewenangan Pusat	Tuntutan ketersediaan data
2.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Belum tersedia data	Merupakan kewenangan Pusat	Tuntutan ketersediaan data
3.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Belum tersedia data	Merupakan kewenangan Pusat	Tuntutan ketersediaan data
4.	Proporsi individu yang menggunakan internet	Belum tersedia data	Merupakan kewenangan Pusat	Tuntutan ketersediaan data
5.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Belum optimalnya kapasitas PPID	Pemahaman stakeholder terhadap pentingnya penguatan PPID masih kurang	Kebutuhan masyarakat terhadap Pelayanan Informasi Daerah cukup tinggi
6.	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Belum tersedia data	Merupakan kewenangan Pusat	Tuntutan ketersediaan data

7.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Belum tersedia data	Merupakan kewenangan Pusat	Tuntutan ketersediaan data
----	---	---------------------	----------------------------	----------------------------

E. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah di tinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah,

Dalam melaksanakan urusan konkuren Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian masih banyak tugas dan fungsi belum terlaksana secara optimal khususnya penyebaran informasi pemerintah daerah ke masyarakat dan penerapan e-government perangkat daerah.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian

Fokus Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Selatan belum dapat disampaikan , karena sampai dengan renstra ini disusun, dalam waktu yang bersamaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam proses penyusunan.

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan urusan komunikasi dan informatika yaitu Pengembangan fasilitas hotspot pada fasilitas publik, sedangkan indikator lainnya merupakan kewenangan kementrian/swasta.

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kemampuan, Kabupaten/Kota mungkin baru dapat mengampu 1 (Satu) indikator saja, yaitu : *“Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur*

dalam peraturan perundang-undangan”, sedangkan untuk 6 (enam) indikator lainnya merupakan kewenangan Pusat atau Provinsi.

Metode penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani adalah melalui analisis faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan memperhatikan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait baik melalui rapat konsultasi, forum Perangkat Daerah dan lain-lain.

Dari berbagai kondisi diatas, dapat tergambaran isu-isu strategis yang akan ditangani dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun Renstra 2021-2026, sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan komunikasi, informasi publik dan kualitas data statistic di Kab. HST
2. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan TIK, E-Government dan Persandian Kab. HST
3. Peningkatan kapasitas aparatur diskominfo yang terlatih dan terampil di bidang TIK, Komunikasi dan Informasi Publik
4. Peningkatan pemanfaatan TIK sektor ekonomi dan bisnis.
5. Mewujudkan masyarakat cerdas digital.
6. Reformasi Birokrasi Diskominfo

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran :
- a. Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan
 - b. Meningkatnya penerapan e-Government
- Tujuan 2 : Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral untuk pembangunan, dengan sasaran :
Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral daerah
- Tujuan 3 : Meningkatkan pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sasaran :
Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian
- Tujuan 4 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional, dengan sasaran :
Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo

Gambaran tujuan dan sasaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2021 – 2026

NO.	TUJUAN	SARAPAN	INDIKATOR TULUH/SASARAN	TARGET CENTRA TUJUAN/SASARAN					
				PERA TAHUN RT-					
				2023	2024	2025	2026	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan pelayanan komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya penyebaran Informasi dan Komunikasi pemerintahan	Indeks SI/BS	3,33	3,33	3,43	3,43	3,44	3,33
			Indeks kegunaan masyarakat terhadap akses dan kualitas Layanan Informasi pemerintahan	70	72	75	76	78	80
			Meningkatnya peran serta e-Government	33%	40%	53%	53%	53%	53%
2	Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral untuk pembangunan	Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Presentase IP memanfaatkan data untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Presentase ekspedisi data statistik sektoral redunegrowd	0%	20%	30%	50%	50%	100%
3	Meningkatkan pelayanan perantara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi	Indeks KAM	340	330	314	340	330	414
			Presentase KAM keamanan Informasi yang bertanggung nilai risiko Bidekominfo	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Bidekominfo	77	77,5	78	78,5	79	80
4	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan untuk kemaritiman, statistik dan perikanan yang bertanggung, akuntabel dan								

BAB. V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Strategi yang diambil untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan informasi adalah dengan peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika. Dengan adanya peningkatan pelayanan publik yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan lebih baik dengan prosedur yang sederhana, mudah, cepat dan akurat serta adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi SKPD kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan

Kebijakan yang akan dijalankan:

- a. Penguatan pengelolaan berita, isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat
- b. Menguatkan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
- c. Menguatkan pengelolaan media komunikasi publik
- d. Menguatkan Kapasitas PPID
- e. Menguatkan kerjasama media
- f. Optimalisasi kemitraan strategis pemerintah
- g. Penguatan Sumberdaya komunikasi publik
- h. Pemenuhan Sarana Pendukung Informasi

2. Meningkatkan kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan e-government

Kebijakan yang akan dijalankan:

- a. Optimalisasi Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Optimalisasi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Penguatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

- d. Penguatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - e. Penguatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - f. Penguatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
3. Mengupayakan kelengkapan data statistik sektoral daerah
- Kebijakan yang akan dijalankan:
- a. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
 - b. Penguatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - c. Pemenuhan Metadata Statistik Sektoral
4. Meningkatkan Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Persandian
- Kebijakan yang akan dijalankan:
- Penguatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
5. Optimalisasi Manajemen, Keuangan, Kepegawaian, Barang Milik Daerah, dan kinerja perangkat daerah
- Kebijakan yang akan dijalankan:
- a. Meningkatkan koordinasi agar Jadwal Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tidak bersamaan waktunya dengan jadwal kegiatan yang lain
 - b. Penguatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Penguatan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
 - d. Penguatan pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik daerah.

Tabel 11

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)				
MISI II : Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	Penguatan pengelolaan berita, isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat	
			Menguatkan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	
			Menguatkan pengelolaan media komunikasi publik	
			Menguatkan Kapasitas PPID	
			Menguatkan kerjasama media	
			Optimalisasi kemitraan strategis pemerintah	
	Meningkatnya penerapan e-Government	Meningkatkan kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan e-government	Meningkatkan kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan e-government	Penguatan Sumberdaya komunikasi publik
				Pemenuhan Sarana Pendukung Informasi
				Optimalisasi Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
				Optimalisasi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			Penguatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	
			Penguatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
			Penguatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	
			Penguatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	

			Penguatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral untuk pembangunan	Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengupayakan kelengkapan data statistik sektoral daerah	Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
			Penguatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Pemenuhan Metadata Statistik Sektoral
Meningkatkan pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Meningkatkan Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Persandian	Penguatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	Optimalisasi Manajemen, keuangan, Kepegawaian, Barang Milik Daerah, dan kinerja perangkat daerah	Meningkatkan koordinasi agar Jadwal Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tidak bersamaan waktunya dengan jadwal kegiatan yang lain
			Penguatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Penguatan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
			Penguatan pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik daerah

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pencapaian beberapa kelompok sasaran maka dibutuhkan beberapa program yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatifnya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk kurun waktu tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 4) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 5) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
 - 6) Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - 7) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 8) Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
 - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten

- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - 4) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 5) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 3) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 12

Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyediaan informasi dan komunikasi pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi pemerintah	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	40	50	3,224,922,050	60	3,461,973,100	65	3,808,170,410	70	4,188,987,451	75	4,607,886,196	80	5,068,674,816	80	24,360,614,023		
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan saluran komunikasi dan informasi oleh masyarakat	0	60%	3,224,922,050	70%	3,461,973,100	75%	3,808,170,410	80%	4,188,987,451	85%	4,607,886,196	90%	5,068,674,816	90%	24,360,614,023		
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah berita, isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat yang diindaklanjuti melalui media publik	0	0	-	50	10,000,000	60	11,000,000	70	12,100,000	80	13,310,000	90	14,641,000	350	61,051,000		
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan ke	0	20	-	30	5,000,000	40	5,500,000	50	6,050,000	60	6,655,000	70	7,320,500	270	30,525,500		
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyediaan Informasi Publik	203,559	207,396	23,592,100.00	212,581	123,409,900.00	217,766	135,750,890	222,951	149,325,979	228,136	164,258,577	233,321	180,684,435	1,322,151	777,021,880		
			Pelayanan Informasi Publik	Jenis Pelayanan Informasi yang tersedia	0	3	30,800,000.00	3	1,003,190,000	3	1,103,509,000	3	1,213,859,900	3	1,335,245,890	3	1,468,770,479	3	6,155,375,269		
			Layanan Hubungan Media	Jenis Layanan Hubungan Media	1	4	3,088,816,700	4	2,129,226,700	4	2,342,149,370	4	2,576,364,307	4	2,834,000,738	4	3,117,400,811	4	16,087,958,626		
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jenis mitra strategis pemerintah	1	2	77,737,000	2	10,000,000	3	11,000,000	3	12,100,000	4	13,310,000	4	14,641,000	4	138,788,000		
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber daya meningkat kompetensinya	0	10	3,976,250	15	10,952,500	20	12,047,750	25	13,252,525	30	14,577,778	37	16,035,555	37	70,842,358		
			Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Sarana Pendukung Informasi yang di adakan	0	0	-	4	170,194,000.00	2	187,213,400	2	205,934,740	2	226,528,214	2	249,181,035	12	1,039,051,389		

	Meningkatnya penerapan e-Government	Persentase perangkat daerah yang menerapkan e-Gov	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	38%	38%	2,357,491,000	48%	2,818,756,288	58%	3,100,631,917	68%	3,410,695,108	78%	3,751,764,619	88%	4,126,941,081	88%	19,566,280,014		
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan domain resmi	24%	35%	-	46%	5,000,000	57%	5,500,000	68%	6,050,000	84%	6,655,000	100%	7,320,500	100%	30,525,500		
			Pematalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan domain resmi	9	13	-	17	5,000,000	21	5,500,000	25	6,050,000	31	6,655,000	37	7,320,500	37	30,525,500		
			Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi	100%	100%	2,357,491,000	100%	2,813,756,288	100%	3,095,131,917	100%	3,404,645,108	100%	3,745,109,619	100%	4,119,620,581	100%	19,535,754,514		
			Pematalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Perangkat Daerah yang di awasi	37	37	2,164,853,000	37	449,533,688	37	494,487,057	37	543,935,762	37	598,329,339	37	658,162,273	37	4,909,301,119		
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data	37	37	-	37	5,000,000	37	5,500,000	37	6,050,000	37	6,655,000	37	7,320,500	37	30,525,500		
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Inta Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah dengan Kondisi Internet aman dan berkualitas	34	34	-	34	2,088,308,800	34	2,297,139,680	35	2,526,853,648	36	2,779,539,013	37	3,057,492,914	37	12,749,334,055		
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan	37	37	192,638,000.00	37	197,741,800	37	217,515,980	37	239,267,578	37	263,194,336	37	289,513,769	37	1,399,871,463		
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi	2	3	-	4	73,172,000	5	80,489,200	6	88,538,120	7	97,391,932	8	107,131,125	8	446,722,377		

Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral untuk pembangunan	Meningkatnya pengdolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang terbaharui	100%	100%	23,341,000	100%	85,886,000	100%	94,474,600	100%	103,922,060	100%	114,314,266	100%	125,745,693	100%	547,683,618.60		
				Persentase kelengkapan data sektoral	81%	100%	23,341,000	100%	85,886,000	100%	94,474,600	100%	103,922,060	100%	114,314,266	100%	125,745,693	100%	547,683,618.60		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	1	2	23,341,000	2	39,933,500	2	43,926,850	2	48,319,535	2	53,151,489	2	58,466,637	12	267,139,011		
				Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	0	0	-	16	10,952,500.00	17	12,047,750	18	13,252,525	19	14,577,778	20	16,035,555	20	66,866,108		
				Membangun Metadata Statistik Sektoral	14	15	-	16	35,000,000	17	38,500,000	18	42,350,000	19	46,585,000	20	51,243,500	20	213,678,500		
Meningkatkan pengdolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Kasus keamanan informasi yang terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase peningkat daerah monapikan Keamanan Informasi	5.6%	5.6%	-	8.3%	88,062,000	11.1%	96,868,200	13.9%	106,555,020	16.7%	117,210,522	19.4%	128,931,574	19.4%	537,627,316		
				Persentase Peningkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	0%	6%	-	11%	88,062,000	25%	96,868,200	39%	106,555,020	53%	117,210,522	67%	128,931,574	67%	537,627,316		
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	4	-	8	88,062,000	12	96,868,200	16	106,555,020	20	117,210,522	24	128,931,574	24	537,627,316		
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang terpadu, akuntabel dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	nilai sikap Diskominfo	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase penunjang urusan Sekretariat berjalan sesuai standar	100%	100%	2,913,912,460	100%	3,259,346,160	100%	3,922,059,210	100%	8,929,050,665	100%	3,477,141,866	100%	3,562,556,686	100%	26,064,067,047		
				Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peningkat Daerah	100%	100%	7,654,000	100%	39,531,500	100%	43,484,650	100%	47,833,115	100%	52,616,427	100%	57,878,069	100%	248,997,761		
				Penyusunan Dokumen Pencanaan Peningkat	4	4	3,723,000	4	26,317,500	4	28,949,250	4	31,844,175	4	35,028,593	4	38,531,452	24	164,393,969		

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD	3	3	3,931,000	3	13,214,000	3	14,535,400	3	15,988,940	3	17,587,834	3	19,346,617	18	84,603,791
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	100%	2,544,817,460	100%	2,557,407,460	100%	2,570,217,460	100%	2,583,067,460	100%	2,596,067,460	100%	2,609,007,460	100%	15,460,384,760
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	17	17	2,543,867,460	18	2,556,367,460	19	2,568,867,460	20	2,581,367,460	21	2,593,867,460	22	2,606,367,460	22	15,450,704,760
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	10	10	750,000	13	1,040,000	15	1,350,000	17	1,700,000	20	2,200,000	22	2,640,000	97	9,680,000
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	100%	-	100%	6,000,000	100%	6,600,000	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	8,784,600	100%	36,630,600
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan BMD-PD	2	2	-	2	6,000,000	2	6,600,000	2	7,260,000	2	7,986,000	2	8,784,600	12	36,630,600
			Administrasi Kepegawaian PD	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	100%	-	100%	16,200,000	100%	17,100,000	100%	18,000,000	100%	18,900,000	100%	19,800,000	100%	90,000,000
			Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaihan Dinas Beserta Atributnya	0	0	-	18	7,200,000	19	7,600,000	20	8,000,000	21	8,400,000	22	8,800,000	100	40,000,000
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai PD	17	17	-	18	4,500,000	19	4,750,000	20	5,000,000	21	5,250,000	22	5,500,000	22	25,000,000
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring dan Penilaian Kinerja Pegawai	17	17	-	18	4,500,000	19	4,750,000	20	5,000,000	21	5,250,000	22	5,500,000	117	25,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	100%	91,256,900	100%	277,961,400	100%	285,545,720	100%	303,177,672	100%	319,422,819	100%	336,722,481	100%	1,614,086,992
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penarikan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen	8	8	1,697,800	8	3,533,600	8	3,886,960	8	4,275,656	8	4,703,222	8	5,173,544	8	23,270,781
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	5	5	16,208,000	5	34,029,600	5	37,432,560	5	41,175,816	5	45,293,398	5	49,822,737	5	223,962,111
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan dan digandakan	5	5	8,049,100	5	16,098,200	5	16,098,200	5	16,098,200	5	16,098,200	5	16,098,200	5	88,540,100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Postur Perundang-undangan	Jumlah cop bacaan dan pinudangan yang disediakan	1584	1584	7,128,000	1584	7,128,000	1584	7,128,000	1584	7,128,000	1584	7,128,000	1584	7,128,000	9504	42,768,000
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	150	168	8,235,000	300	15,000,000	360	18,000,000	420	21,000,000	444	22,200,000	480	24,000,000	2172	108,435,000

			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi PD yang diselenggarakan	18	18	49,939,000	19	199,672,000	20	200,000,000	21	210,000,000	22	220,000,000	23	230,000,000	123	1,109,611,000		
			Penatausahaan Anis Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan anis dinamis PD	0	0	-	2	2,500,000	2	3,000,000	2	3,500,000	2	4,000,000	2	4,500,000	10	17,500,000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	50%	50%	-	60%	41,000,000	65%	645,741,000	70%	5,581,005,000	75%	54,571,000	80%	60,028,100	80%	6,382,345,100		
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	0	-	0	-	1	600,641,000	1	5,531,395,000	0	-	0	-	1	6,132,036,000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	0	0	-	2	41,000,000	2	45,100,000	2	49,610,000	2	54,571,000	2	60,028,100	10	250,309,100		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	208,639,400	100%	212,426,800	100%	233,669,480	100%	257,036,428	100%	282,740,071	100%	311,014,078	100%	1,505,526,257		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang digunakan	2	2	4,990,000	2	5,489,000	2	6,037,900	2	6,641,690	2	7,305,850	2	8,036,445	2	38,500,894		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa sumberdaya air dan jasa listrik yang dipakai	1. 240 mt 2. 372 m3 3. 71688 kwh	1. 240 mt 2. 372 m3 3. 71688 kwh	140,688,000	1. 240 mt 2. 372 m3 3. 71688 kwh	140,688,000	1. 240 mt 2. 372 m3 3. 71688 kwh	154,756,800	1. 240 mt 2. 372 m3 3. 71688 kwh	170,232,480	1. 240 mt 2. 372 m3 3. 71688 kwh	187,255,728	1. 240 mt 2. 372 m3 3. 71688 kwh	205,981,301	1. 1.440 mt 2. 2.232 m3 3. 11.9488 kwh	999,602,309		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	4	62,961,400	4	66,249,800	4	72,874,780	4	80,162,258	4	88,178,484	4	96,996,332	4	467,423,054		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	61,744,700	100%	108,819,000	100%	119,700,900	100%	131,670,990	100%	144,838,069	100%	159,321,898	100%	726,095,577		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perlizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	6	6	39,100,700	6	69,771,000	6	76,748,100	6	84,422,910	6	92,865,201	6	102,151,721	6	465,059,632		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	16	16	7,896,000	16	9,152,000	16	10,067,200	16	11,073,920	16	12,181,312	16	13,399,443	16	63,569,875		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	0	202	14,948,000	235	29,896,000	235	32,885,600	235	36,174,160	235	39,791,576	235	43,770,734	235	197,466,070		
							8,519,666,510		9,714,023,548		11,022,204,337		16,739,210,304		12,068,317,469		13,012,849,850		71,076,272,018		

BAB. VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 - 2026

Sebagai komitmen pendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tabel berikut menggambarkan indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026.

Tabel 12

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja (Tugas dan Fungsi)	Target Disesuaikan dengan Tahun							Kondisi Kinerja pada tahun pertama RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
I	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
	2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi	10	10	10	10	10	10	10	10
II	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
III	5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
IV	7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000

BAB. VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026, merupakan pedoman pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016–2021. Dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya (anggaran) Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran-sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

A. Pedoman Transisi

1. Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan pada saat transisi dan dengan adanya pemilukada serentak dan kekosongan jabatan politik kepala daerah, maka Renja SKPD 2021 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah periode ini serta mengingat waktu yang sangat sempit bagi Kepala Dinas untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2027-2031 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja) tahun 2027, maka Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021–2026 merupakan dasar dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2027, Selanjutnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih baik.
2. Pedoman masa transisi tersebut bertujuan menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang belum tertangani sampai dengan periode Renstra ini berakhir, sekaligus mengantisipasi berbagai permasalahan pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Dengan demikian, Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika masa transisi merupakan bagian dari perencanaan pembangunan tahun pertama pemerintahan baru yang

tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026, yang didalamnya memuat strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Relevan dengan itu, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk setiap tahunnya, yang disusun berdasarkan Rencana kerja sekretariat dan bidang-bidang pada dinas Komunikasi dan Informatika
2. Setiap perangkat Perangkat Daerah bidang-bidang dan sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika berkewajiban menyusun Rencana kerja tiap tahun, yang mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026, yang memuat program-program prioritas sesuai tugas pokok dan fungsinya guna mendukung pencapaian visi, misi dan arah kebijakan yang diamanatkan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai tujuan dan sasaran capaian yang telah ditetapkan.
3. Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika Kepala Dinas berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dengan mengerakkan secara optimal semua potensi, sarana prasara fasilitas dan SDM yang dimiliki.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkewajiban untuk menyusun kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya sebagai pedoman penyusunan RKA dan DPA Perangkat Daerah

5. Dalam rangka terwujudnya segala dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka kepada Kepala Dinas berkewajiban melakukan koreksi.

Barabai, 18 September 2021
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah



EDINA FITRIA RAHMAN, S.STP, MM
NIP. 19840711 200312 2 001

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Hulu Sungai Tengah government. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH' and 'DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'EDINA FITRIA RAHMAN, S.STP, MM' and the NIP number '19840711 200312 2 001' are printed.